

Elite Puri dalam Lanskap Politik Kontemporer di Bali

I Putu Gede Suwitha

Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Udayana

Email: putu_suwitha@yahoo.co.id

Abstract

There is been few studies on the role of local or traditional elites in Bali in the context of national politics in Bali. It seems that the traditional Balinese elites played a dominant role in the context of political culture in the past, particularly since the fall of Bali in the fourteenth Century until nineteenth century. However, this situation has still developed in the recent situation and will be in the future. This study concentrates on the role of the traditional Balinese elites in the context of recent situation in terms of democracy and the involvement of the elites particularly after the reformation period and also trying to show to what extent the role of the traditional Balinese elite in terms of democracy in modern politics.

Keyword: traditional Balinese elites, caste system, political capital, and money politics

Abstrak

Studi kepemimpinan lokal di Bali yang belum banyak diungkapkan dalam suatu studi khusus, yaitu tokoh puri (istana). Peranan puri atau tokoh puri sangat krusial dalam konteks budaya politik sejak setelah ekspedisi Majapahit abad ke-14 hingga datangnya Belanda sebagai penjajah pada abad ke-19 di Bali. Studi ini akan mengungkapkan peranan elite puri sebagai simbol kekuasaan tradisional dan implikasinya dalam pembangunan politik yang demokratis, khususnya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung setelah Reformasi. Kondisi tersebut masih berlanjut hingga kini dan tidak tertutup kemungkinan masih mewarnai politik modern di Bali.

Kata Kunci : elite puri, sistem kasta, modal politik, politik uang

Pendahuluan

Ada suatu yang menarik dalam aspek kepemimpinan lokal di Bali yang belum banyak diungkapkan yaitu peranan tokoh *puri* (istana atau keraton) dalam konteks dinamika budaya politik khususnya dalam suksesi kepemimpinan di Bali dalam era reformasi sejak tahun 1998. Bagaimana peranan *puri* sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan tradisional dan implikasinya dalam pembangunan politik demokratis khususnya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

Dalam periode yang panjang sebelum datangnya Belanda sebagai penjajah abad ke-19, telah dikenal menonjol peranan *puri* dalam pentas sejarah politik. Sejak Bali mengalami apa yang dikenal dengan masa periode feodalisme agraris kira-kira setelah ekspansi Kerajaan Majapahit tahun 1343, pemerintahan ditandai dengan sistem kekuasaan menurut sistem kasta yang ketat (Raka Santeri, 1990). Bahkan, setelah Kerajaan Gelgel mengalami desintegrasi abad ke-18, kekuatan *puri-puri* menyebar ke daerah-daerah. Muncul kerajaan-kerajaan baru yang “merdeka” yang tadinya bekas vazal Kerajaan Gelgel yang jumlahnya delapan, yakni sama dengan jumlah kabupaten yang ada sekarang di Bali.

Adanya struktur dan formasi sosial yang berstratifikasi, maka kebudayaan yang terbentuk adalah kebudayaan agraris feodal. Fungsi-fungsi arsitektur rumah misalnya, pada umumnya mengadopsi sistem agraris. Rumah-rumah raja dan para bangsawan dibangun besar dan megah. Terjadi stratifikasi dalam bentuk rumah dan bahasa yang berstratifikasi antara golongan berkasta dengan masyarakat biasa misalnya masyarakat petani. *Puri-puri* dibangun terkadang dengan arsitektur-arsitektur modern pada zaman itu seperti arsitektur Barat dan Cina (Gelebet, 1986).

Beberapa arsitektur tertentu hanya boleh digunakan dalam rumah mereka yang berkasta tinggi, seperti memakai batu bata, penggunaan *kuri agung* (gerbang agung), kursi agung, ornamen-ornamen Cina, *patra Cina*, *patra Mesir* dan simbol-simbol lainnya

(Sulistiyawati, 2008 : 63-73). Demikian juga perbedaan-perbedaan dalam tata cara pergaulan dan gaya hidup (*life style*). Dalam hal upacara-upacara tertentu, terdapat perbedaan tingkat, seperti upacara *Ngaben* (pembakaran mayat) di kalangan bangsawan dilakukan secara besar-besaran dan meriah. Kesenian yang ada juga menunjukkan kesenian istana yang bentuk-bentuknya menunjukkan perlambangan keagungan bangsawan tinggi yang adhi luhung, seperti tari gambuh dan tari legong keraton. Memang kebudayaan seperti ini mulai luntur sejak akhir abad ke-19, bahkan rumah-rumah orang biasa yang kaya seperti di Gianyar sudah menyerupai puri meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana.

Puri Abad ke-19 – ke-20

Pada abad ke-19 terjadi perubahan drastis dalam konstelasi politik puri-puri di Bali. Terjadi rivalitas dan perang-perang antarkerajaan. Pada periode ini muncul empat kerajaan yang kuat di Bali, yaitu Kerajaan Badung, Kerajaan Buleleng, Kerajaan Mengwi, dan Kerajaan Karangasem. Kerajaan Badung pernah menguasai Kerajaan Jembrana dan Kerajaan Mengwi dan termasuk kerajaan yang kaya karena mengusahakan perdagangan di Kuta. Kerajaan Mengwi juga sampai menguasai Blambangan (Banyuwangi). Kerajaan Buleleng juga sempat menguasai Blambangan – Banyuwangi, dan Kerajaan Karangasem mengungsi ke Buleleng dan Lombok.

Ada beberapa kerajaan yang terpisah atau diambil oleh kerajaan lain. Di lain pihak, ada penyatuan antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya untuk menjadikan kekuasaan dan kekuasaan lebih besar. Dalam konteks yang lain sesudah periode ini ditandai dengan adanya hubungan yang intensif dengan Barat (Belanda). Selanjutnya sejarah politik puri-puri di Bali mempunyai suatu ciri yang sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Puri dan kerajaan mulai berani dan bisa bermain politik untuk memperbesar kekuasaan. Kerajaan Badung sudah

mulai mengadakan hubungan-hubungan dengan Belanda. Kerajaan Badung juga memberikan fasilitas untuk memajukan perdagangan di Badung dengan memberikan kepada Mads Lange dan Nederlandsch Handel-Maatschappij (NHM) konsesi ekonomi dan perdagangan di Badung. NHM membangun kantor dagang di Kuta. Mads Lange seorang pedagang Denmark menyewa pelabuhan Kuta dan sekitarnya kepada Raja Badung (Nielsen, 1928).

Pada periode abad ke-19 terdapat sepuluh kerajaan yang besar dan masing-masing mandiri dan berdaulat. Rivalitas antarkerjaan semakin panas dan terjadi perang-perang yang berkepanjangan. Pada belahan kedua abad ke-19, tinggal delapan kerajaan yang masih eksis. Kedelapan kerajaan ini sempat mengadakan perjanjian tidak saling menyerang karena pengaruh Kerajaan Klungkung yang masih dianggap sebagai simbol kerajaan tertua (Sidemen, 1992). Perjanjian antarkerajaan dikenal dengan nama Pasura Asta Negara (Arsip Nasional RI, 1973). Kerajaan Mengwi dan Kerajaan Payangan kemudian pudar karena peperangan dan hilang dari konstelasi politik Bali. Sekarang Mengwi muncul kembali dengan Kota Mangupura sebagai ibukota Kabupaten Badung yang baru. Kabupaten Badung yang lama menjadi pemerintahan Kota Denpasar sejak tahun 1999.

Loncatan yang luar biasa, pada masa prakemerdekaan dan pascakemerdekaan elite puri bahkan muncul dalam konstelasi politik pada “level nasional” karena hasil dari pendidikan Barat jauh sebelum kemerdekaan. Memang kalau dibandingkan dengan elite Jawa, Sunda, atau Minang, para elite Bali (tokoh puri) masih berada di bawah ketiga elite tersebut. Dengan kata lain, baik secara kuantitas dan kualitas, ketiga etnis di atas lebih dahulu melangkah mengalami modernisasi. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan etnis yang lain, etnis Bali terutama tokoh Puri sudah jauh berada di depan mengalami proses modernisasi dan transformasi. Hal ini menjadi menarik, karena secara

kuantitas masyarakat Bali kecil jumlahnya. Akan tetapi, akibat perkembangan yang pesat dan akses jaringan yang luas sekarang etnis Bugis-Makasar, Batak, Madura, Aceh, dan yang lain sudah jauh meninggalkan etnis Bali.

Jauh sebelum kemerdekaan, Bali sudah mempunyai elite puri sebagai sastrawan nasional yang terkenal A.A. Panji Tisna, seorang putra Raja Buleleng, juga seorang intelektual dari Puri Ubud Tjokorda Raka Sukawati yang kemudian menjadi anggota volksraad. Beberapa pamong praja didikan Barat, seperti I.B. Manuaba dan I Gusti Bagus Oka yang kemudian menjadi Residen Bali. Selain itu, Bali juga memiliki dokter generasi pertama sebelum kemerdekaan, seperti dokter A.A. Jelantik dan dokter I Gusti Ngurah Gde Ngurah. Dalam bidang militer I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Putu Wisnu, dan I Gusti Bagus Sugianyar adalah militer profesional yang berbeda dari kebanyakan militer pada zamannya yang tidak berlatar belakang pendidikan militer.

Menjelang dan sesudah proklamasi, elite Puri semakin menonjol di level nasional terutama dalam bidang politik dan pemerintah, yaitu Mr. Ida A.A. Gde Agung dan Mr. I Gusti Ketut Puja. Mr. I Gusti Ketut Puja kemudian mendapat gelar pahlawan nasional karena peran yang aktif dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, ikut mempersiapkan UUD 1945 dan kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan beliau diangkat menjadi Gubernur Sunda kecil yang pertama. Mr. Ida Anak Agung Gde Agung kemudian juga diangkat menjadi pahlawan nasional karena peranan yang menonjol dalam bidang diplomasi, hubungan luar negeri, dan pemerintahan. Tokoh Bali lain yang dari kalangan puri tidak kalah pentingnya dalam bidang pemerintahan dan sosial, seperti I Gusti Ketut Ranuh, I Gusti Bagus Sugriwa, Rsi Ananda Kusuma, dan I Gusti Ketut Kaler.

Pada masa pemerintahan RIS, Tjokorda Raka Sukawati yang pernah menjadi anggota Volksraad diangkat menjadi Presiden Negara Indonesia Timur (NIT) bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Ida Anak Agung Gde Agung sebagai menteri

dalam negeri NIT yang berkedudukan di Makasar. Pada masa ini belum ada putera daerah dari Sulawesi Selatan yang berpendidikan tinggi. Kahar Muzakar tokoh militer senior dan disegani pada waktu itu hanya tamatan sekolah menengah Muhammadiyah di Solo. Andi Pangerang Peta Rani tokoh pamong praja hanya tamatan sekolah menengah.



Pada zaman Sukarno elite Puri dari Bali terus berada dalam orbit kekuasaan. Salah satu yang menonjol pada zaman Sukarno adalah menteri dari Bali, I Gusti Ngurah Subamia.

Foto 1. I Gst Ngurah Rai adalah pahlawan Nasional yang berasal dari Puri Carangsari (Badung).

Pada masa perjuangan kemerdekaan elite puri sangat berperan. Pejuang-pejuang yang berpusat di Badung, Tabanan, dan Buleleng melahirkan tokoh puri sebagai pejuang yang militan. I Gusti Ngurah Rai berasal dari Puri Carangsari yang kemudian menjadi pahlawan nasional (lihat foto 1). Beberapa elite puri, seperti I Gusti Ngurah Partha, I Gusti Putu Wisnu, I Gusti Ngurah Debes, I Gusti Ngurah Pinda, Dewa Made Suwija dan yang lainnya telah berjasa dan sebagai pimpinan dalam perlawanan rakyat Bali menentang penjajah. Setelah revolusi, para elite puri kemudian terus berkiprah dalam bidang politik maupun ekonomi.

Dinamika Elite Puri

Perkembangan politik elite Puri Bali pada masa setelah revolusi 1945 dapat dilihat dari perkembangan partai-partai politik seperti juga di Jawa. Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Sukarno berkembang di Bali menjadi partai terbesar pada periode 1960-an. Partai ini didirikan oleh seorang nasionalis dari Puri Satria Denpasar yang bernama Tjokorda Ngurah Agung. Partai kedua dan ketiga terbesar di Bali, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga dipimpin oleh elite puri. Dalam pemilihan Gubernur Bali yang pertama setelah lepas dari Sunda Kecil, Presiden Sukarno juga mengangkat A.A. Bagus Sutedja sebagai Gubernur Bali yang pertama. Padahal dalam pemilihan yang dilakukan oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) yang menang adalah Nyoman Mantik, tetapi Presiden Sukarno memilih AA. Bagus Sutedja. Apa alasan Presiden memilih tokoh puri, sampai sekarang tidak diketahui.

Strategi politik Orde Baru pada awalnya seakan-akan mengurangi peran politik puri. Soeharto melalui proyek modernisasi politik justru menempatkan puri sebagai sentral unsur G (Golkar), di samping ABRI dan birokrasi. Partai politik disederhanakan, yang ada dan boleh berkembang hanyalah Golkar, tetapi Golkar juga akhirnya mempergunakan potensi puri yang tergabung dalam kelompok ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Masih tetap menonjolkan puri sebagai unsur G. Golkar baru “yang dikenal pada era Reformasi” masih tetap menjadikan elite puri sebagai kekuatan yang menentukan. Tokoh Puri yang pernah menjadi elite Golkar adalah Tjokorda Pemecutan dari Puri Pemecutan, Tjokorda Budi Suryawan dari Puri Ubud, dan I Gusti Ngurah Alit Yuda dari Puri Carangsari putra I Gusti Ngurah Rai (Pahlawan Nasional).

PDI Perjuangan juga tidak mau ketinggalan berkolaborasi dengan para elite puri. Apalagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan jelmaan PNI yang berpusat di

Puri Satria seperti disebutkan di depan. Tokoh PDI Perjuangan Bali adalah A.A. Oka Ratmadi adalah tokoh Puri Satria yang berseberangan dengan saudaranya Cokorda Pemecutan dari Puri Pemecutan sebagai tokoh Golkar. I Ketut Ardhana (1993) dalam studinya tentang puri-puri di Bali menyebutkan terjadi persaingan yang tajam antara Puri Pemecutan dan Puri Satria. Puri Pemecutan dahulunya berafiliasi pada PSI dan kemudian Golkar. Puri Satria dahulu sebagai pusat PNI dan sekarang menjadi ikon PDI Perjuangan Bali. Pada masa Reformasi beberapa puri menunjukkan identitasnya sebagai identitas partai tertentu.

Puri pada Masa Reformasi

Sejak Reformasi dan tumbangnya Orde Baru tahun 1998, terjadi perubahan politik yang mendasar pada masyarakat Bali. Telah lahir wacana-wacana baru di masyarakat yang mengangkat berbagai persoalan sosial-kemasyarakatan dengan paradigma baru. Hal ini dapat dilihat dari tulisan-tulisan di koran-koran sejak 1998. Masyarakat mengalami fase baru, emansipasi yang sulit dibayangkan pada masa-masa sebelumnya.

Tren yang menarik dalam bidang politik adalah munculnya wacana-wacana ingin memunculkan elite Puri dalam suksesi kepemimpinan yang sudah lama dilupakan. Elite puri masih tetap dianggap sebagai simbol dan paling sedikit mempunyai kekuatan moral dan penjaga moral masyarakat yang sedang mengalami euforia kebebasan setelah lama dibelenggu oleh kepemimpinan yang otoriter pada zaman Orde Baru. Meskipun sesungguhnya kekuatan puri juga sudah lama berada dalam pusaran kekuasaan, secara kualitas terbatas, wacana-wacana dan berita-berita media pers mengelus-elus elite Puri untuk berani tampil secara demokratis. Berita-berita di media pers lokal menyebut “Puri Karangasem sudah bersiap-siap akan jagonya” untuk pilkada. “Kekuatan Puri Gianyar bisa terbelah, Cok Nindya gaet adik kandung A.A. Bharata sebagai calon wakil

Bupati Gianyar”, terjadi rivalitas Cok Nindya tokoh Puri Peliatan dan A.A. Bharata tokoh Puri Gianyar dalam wadah partai yang berbeda. Itulah beberapa cuplikan berita koran lokal yang terbit menjelang pemilihan kepala daerah (*Nusa*, 26 Maret 2010).

Fenomena pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hal yang baru. Bahkan, tidak banyak orang menyadari bahwa sejak memasuki tahun 2004 kita sudah memasuki budaya baru, era baru. Suatu vista baru dalam sejarah politik Indonesia dimana kita sudah diberikan memilih pemimpin kita sendiri dengan bebas dan demokratis, transparan, adil dalam suatu pemilihan langsung.

Suatu yang tidak mungkin atau tabu pada era sebelumnya, dimana rakyat hanya disodori pemimpinnya atau pemimpin yang harus dipilih dan diterima, tidak boleh yang lain. Ruang sudah dibuka lebar-lebar, kita dapat menentukan bersama-sama siapa walikota, bupati, gubernur atau bahkan presiden. Implikasi dari pada itu, rakyat harus siap dengan pemimpin yang baru. Dalam era baru ini pemimpin yang muncul paling sedikit mempunyai tiga modal pokok. Dengan kata lain, persyaratan menjadi pemimpin harus mempunyai tiga modal pokok, yaitu moral, kemampuan, dan kekuatan (modal uang). Barulah terasa kita kekurangan kader sipil yang memenuhi syarat tersebut, yaitu moral yang patut diteladani, kemampuan ilmu pengetahuan dan kecerdasan, kekuatan modal (*banda*). Ketiga kekuatan inilah yang dapat atau mampu memberdayakan masyarakat.

Tanpa disadari sebenarnya sudah lama kita menganut supremasi militer, bukan supremasi sipil. Pergantian dari tokoh militer dengan tokoh sipil tentu berimplikasi pada minimnya kader-kader sipil yang ada sehingga tokoh sipil dari puri mulai diembus-embus dan elite Puri menjadi salah satu alternatif. Kalau dalam tokoh militer dan birokrasi tampil, sekarang sah-sah saja tokoh Puri tampil kedepan. Puri masih memiliki sumber daya manusia yang memadai. Di samping pendidikan dan ekonomi, puri masih mempunyai “sinar” berupa kekuatan moral dan

etika, yang akhir-akhir ini dilupakan.

Pada saat ini semua kekuatan politik dan militer puri yang sudah lama hilang berusaha dibangun lagi. Kekuatan dan kekuasaan Puri secara prosesusal terkikis akibat perubahan politik-ekonomi seperti krisis ekonomi tahun 1930-an, penjajahan Jepang dan Perang Dunia II, perjuangan kemerdekaan dan masalah-masalah ekonomi-politik tahun 1950-an dan dan 1960-an.

Sejak tahun 1970-an, ekonomi Bali mulai membaik terutama bidang pariwisata. Puri-puri masih mempunyai sumber daya yang kuat, baik SDM maupun sumber daya ekonomi seperti tanah-tanah yang luas. Beberapa puri mengembangkan aneka bisnis pariwisata. Pada akhirnya bermuara pada usaha membangun citra puri lewat sosial, budaya, agama, sejarah dan lainnya (Graeme MacRae, 2004). Citra dan *image* puri dibentuk lewat hal-hal yang lebih halus dan nilai-nilai tradisi seperti membantu perbaikan pura, membantu desa adat, dan upacara-upacara keagamaan lainnya. Kemampuan (membangun jaringan sosial) bergaul dan kemampuan mengabdikan kepada rakyat (modal sosial). Ada kalanya masyarakat datang ke puri dan puri tidak pernah menolak permintaan masyarakat. Permintaan itu tidak saja berupa materi, juga nasihat, dan informasi, penjelasan sejarah dan masyarakat umum mendapatkan utang budi (*moral obligation*). Untuk itu kalau ada upacara di puri, masyarakat datang untuk *ngayah* tanpa diberitahu. Bantuan-bantuan berupa nasihat mengenai adat, agama, sejarah merupakan suatu kekuatan yang termasuk dalam kategori "*knowledge is power*". Hal ini memang dasar sistem politik tradisional di Asia Tenggara, yang telah banyak diteliti oleh beberapa pakar, seperti J.M. Gullick (1958) di Malaysia, Ben Anderson (1983), Sumarsaid Moertono (1985), Milner (1980), Scricke (1955) di Jawa, Geertz (1980) dan Schulte Nordholt (2006) di Bali.

Sangat menarik bahwa sistem tradisional ini masih kental pada zaman globalisasi, dan puri masih memiliki hegemoni atau ideologi untuk mendukung, memelihara, dan membenarkan

posisi puri. Melalui proses yang *sophisticated* ini, puri kembali mengambil kekuasaan zaman dulu yang sudah lama hilang. “Kerajaan” baru diambil dari kekuatan militer, politik, melalui pengaruh yang lebih luas dalam bidang adat, agama, sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Modal kepemimpinan tidak hanya kekayaan (berupa tanah), kekuasaan, tetapi kultural, model budaya yang khas. Francis Fukuyama menyebut modal sosial yang berupa jaringan sosial. Di Bali, disamping modal materi (*artadana*), juga rakyat mendapat perlindungan dan informasi. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu (2010) menyebut *symbolic capital*, disamping *economic capital*. Yang termasuk dalam *symbolic capital*, kepercayaan, prestise wibawa, satria, reputasi, nama baik keturunan atau warisan nama. Material *capital* hanya merupakan alat untuk mendapatkan *symbolic capital*. *Symbolic capital* masih kental di Asia Tenggara dan masa depan politik kita. Masyarakat kita masih transisi, hal-hal yang tradisional belum dapat ditinggalkan begitu saja. C. Geertz (1980) menyebut Sandiwara Simbolis, yaitu pertunjukan keunggulan dan ketinggian mereka melalui upacara-upacara yang mewah, besar, dan hebat, bukan kekuasaan materi. Menurut Bourdieu (2010) *symbolic & economic capital* bisa saling tukar (melengkapi), menjadi satu dan sulit dipisahkan. Modal yang tidak berbentuk materi yang berbentuk simbol-simbol seperti gelar kasta, reputasi, wibawa, kepercayaan masyarakat. Simbol-simbol seperti ini dapat membangun cita dan image seorang pemimpin dalam masyarakat yang paternalistik.

Beberapa elite Puri yang berhasil “membangun kerajaan baru” yang mampu mengobinasikan tentang modal seperti yang disebutkan Bourdieu, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Modal ekonomi menentukan terutama ketika terjadi pemilihan langsung, apa yang disebut dengan “ongkos politik” bukan *money politic*. Seorang tokoh politik wajib hukumnya harus melakukan “*simakrama*” ke setiap banjar yan gada, desa adat yang ada, organisasi sosial seperti seka



Foto 2. Puri Gianyar yang masih utuh dan mempunyai sebagai *symbolic power*. (Foto: Slamet Trisila)

yang ada. Ini merupakan biaya politik yang harus dikeluarkan. Meskipun *simakrama* dikatakan sebagai kekerasan simbolik (Bawa Atmadja, 2002). Modal sosial yaitu dapat membangun jaringan sosial dan jaringan kekeluargaan yang menentukan dan modal budaya pengetahuan sejarah, seperti gelar sarjana. Tidak semua puri di Bali mempunyai sumber daya ekonomi, mungkin yang paling menonjol adalah Puri Karangasem (lihat foto 2) yang memiliki beberapa taman dan lahan yang luas, Puri Ubud yang banyak mempunyai tanah untuk disewakan, dan Puri Gianyar yang mampu melaksanakan upacara-upacara agama yang secara spektakuler sebagai *symbolic power*. *Symbolic capital* dan *economic capital*, yang dapat saling melengkapi (lihat foto 3).

Tokoh Puri Mengwi muncul sebagai Bupati Badung dua periode seakan-akan menghapus kutukan sejarah yang banyak disebutkan dalam sumber-sumber daerah (Babad Mengwi). Dahulu Raja Mengwi pernah terlibat dalam pembunuhan



Foto 3. Puri Satria melahirkan beberapa elite lokal dan Nasional, seperti A.A. Oka Ratmadi dan A.A. Puspayoga (Foto: Slamet Trisila)

Pangeran Wilis di Pantai Seseh Badung, padahal Pangeran Wilis (Mas Sepuh) adalah putra Raja Mengwi yang ibunya berasal dari Blambangan. Kutukannya sampai pada generasi ketujuh. Pada generasi ke-8 tokoh puri Mengwi muncul sebagai kekuatan yang menonjol (Schulte Nordholt, 2006).

Tokoh Puri Satria (Denpasar) juga sudah lama menjadi ikon politik Bali (lihat Foto 3). Diawali sebagai puri perjuangan dan tempat lahirnya PNI Bali dan kemudian PDI Perjuangan Bali. Tokoh Puri Satria, seperti A.A.N. Puspayoga dan A.A. Oka Ratmadi, berkali-kali menjadi anggota DPRD, dan Puspayoga kemudian menjadi Walikota Denpasar dan sekarang menjadi Menteri Koperasi pada era Presiden Joko Widodo. Puri Ubud dan Puri Gianyar di Kabupaten Gianyar berkali-kali menjadi Bupati Gianyar. Puri Gianyar sebagai pusat PDIP Gianyar dan Puri Ubud sebagai pusat Partai Golkar. I Gusti Ngurah Alit Yuda putra I Gusti Ngurah Rai (Pahlawan Nasional) berkali-kali menjadi anggota DPR RI dan Ketua Golkar Bali.

Simpulan

Ada beberapa puri memang tidak muncul dalam pentas politik era Pilkada langsung, hal ini mungkin tidak mampu memanfaatkan sumber-sumber daya seperti konsep yang diajukan Bourdieu. Seperti teori C. Geertz, ada beberapa daerah yang mementingkan memelihara puri yang megah sebagian warisan budaya, sangat berarti sebagai modal budaya maupun modal simbolik. Sedangkan beberapa daerah terjadi transformasi yang drastis untuk mementingkan ekonomi. Modal ekonomi tidak bisa selalu diandalkan karena ia harus berganti-ganti posisi, dengan modal budaya, simbolik dan modal sosial lainnya.

Pada akhir uraian dapat dikatakan akar-akar tradisional masih kuat dalam sistem politik di Bali. Tradisi itu merupakan warisan yang tidak pernah mati, tidak memfosil. Tradisi adalah warisan masa lampau yang dinamis. Kalau kita akan membangun sistem politik yang baru kedepan, tentu tidak terlalu jauh dari akar-akar kebudayaan lama diatas. Modern dan baru tidak mesti harus meniru atau mengcopy sistem Barat, seperti halnya sistem demokrasi yang akan kita bangun. Hal yang menarik diketemukan kekuatan moral dan kebenaran Puri masih dapat dihandalkan terbukti tokoh-tokoh Puri sangat jarang tersangkut masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I Ketut. 1993. *Balinese Puri in Historical Perspektif*. Thesis Master, The ANU, Canberra.
- Ardhana, I Ketut. 2004. "Puri dan Politik" : Reformasi Nasional dan Dinamika Politik Regional Bali", dalam Darma Putra (ed.). *Bali menuju Jagaditha, Aneka Perspektif*. Denpasar: Bali Post..
- Arsip Nasional. *Surat-surat Perdjudjian Antara Kerajaan-kerajaan Bali / Lombok Dengan Perintah Hindia Belanda. 1841-1938*. Djakarta: Arnas.
- Berg, C.c. 1927. *Kidung Pamantjangah: De Geschiedenis Van Het Rijk Gelgel*. Sanport: C.A. Mees.

- Bourdieu, Pierre. 2010. *Arena Produksi Kultural. Sebuah Kajian Hasil Budaya* (Terj.). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Brahmoktah Widicastra (Manuskrip) Koleksi Perpustakaan Fakultas Sastra Unud.
- Darsiti S. 1989. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta, 1930-1939*. Yogyakarta.
- Dwipayana, A.A. GN. Ari. 1994. Kebudayaan Bali dalam bidang Dialektika Sejarah. Kertas Kerja yang dibawakan pada Seminar Lembaga Pengkajian Budaya Bali : Denpasar.
- Gelebet, I Nyoman. 1986. *Arsitektur Tradisional Daerah Bali*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Harian *Nusa Bali* dan Harian *Bali Post*.
- Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Kreasi Wacana,
- Lombard, Denys. 2000. *Nusa Jawa : Silang Budaya I, II, III*. Jakarta: Gramedia.
- Mac Rae, Graeme. 2004. "Evolusi Ubud: Sejarah, Tanah, Pariwisata", makalah yang dibawakan di FS Unud 27 Agustus 2004.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Muhlisin, Mumahammad. 2015. Runtuhnya Majapahit dan Berdirinya Kerajaan-kerajaan Islam di Bumi Jawa. Yogyakarta: Araska.
- Mulyana, Slamet. 1979. *Nagara Kreta Gama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta : Bhratara.
- Munandar, Agus Aris. 2005. *Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri di Bali abad ke-14-19*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Nielsen, A.K., 1928. *Leven en Anonturen Van Een Ootinjevaarden op Bali*.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken ed. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV – Obor.
- Nordholt, Henk Schulte. 2006. *The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650-1940*. Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV-Jakarta.
- Paswara Asta Negara. Koleksi Gedong Kirtya – Singaraja.
- Santeri, Raka dan Ketut Wiyana. 1993. *Kasta Dalam Agama Hindu*. Denpasar: PT Bali Post
- Santeri, Raka. 1990. *Kesalahan Pemakaian Kasta Berabad-abad*. Denpasar: Manikgeni.

Schricke, B.J.O. 1955. *Indonesian Sociological Studies I-II*. The Hague – Bandung: W. Van Hoeve.

Sulistiyawati (ed.). 2008. *Integrasi Budaya Tionghoa, Kedalam Budaya Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.

Zuhro, R, Siti dkk. 2009. *Demokrasi Lokal : Perubahan dan Kesenambungan*. Yogyakarta: Ombak.

Zuhro, R, Siti-2009. *Peranan Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.